

IMPLEMENTASI PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA (P2K2) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOMUNITAS ADAT KAMPUNG KUTA, DESA KARANG PANINGGAL, KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS.

Aribowo

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung , aribowo_stks@yahoo.co.id

Lina Favourita Sutiaputri

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, linafavourita_stks@yahoo.com

Abstract

Program Keluarga Harapan (conditional cash transfer) is a program of providing conditional social assistance to families and / or someone who is poor and vulnerable in through conditional cash transfer. Behavior change is carried out through a community learning process called Family Development Session (FDS). In general, FDS aims to increase knowledge and understanding of the importance of education, health and financial management for families. This study aims to describe the process of FDS implementation, techniques for strengthening KPM involvement, community support, obstacles or barriers, and efforts should be created in reducing these obstacles to FDS implementation in the Kampung Kuta indigenous community. The research method uses a qualitative approach with a case study of 6 KPM informants and 3 other informants. The results shows that the implementation of the Conditional Cash Transfer (CCT) FDS had only been conducted several sessions and had support from families and traditional community leaders, although, they still found several obstacles related to customs and also "taboo". Some strategies taken to reduce these obstacles are, program facilitator should repeat the training materials, so it is time consuming. Program facilitator have to understand community characteristics and customary community events, the facilitator tries to carry out activities outside the village to avoid the awkwardness of community members because of the differences.

Keywords:

Indigenous community, Family Development Session (FDS)

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin melalui bantuan tunai bersyarat. Salah satu tujuan PKH adalah menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. P2K2 merupakan proses belajar masyarakat untuk memperkuat terjadinya perubahan perilaku. Secara umum P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan proses implementasi P2K2 , teknik penguatan keterlibatan KPM dalam implementasi P2K2, dukungan masyarakat dalam implementasi P2K2, hambatan dalam implementasi P2K2 , dan upaya yang dilakukan dalam mengurangi hambatan dalam implementasi P2K2 di komunitas adat Kampung Kuta. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus terhadap 6 orang informan KPM dan 3 orang informan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan P2K2 PKH baru dilakukan beberapa sesi dan mendapatkan dukungan dari keluarga dan tokoh tokoh adat, walaupun masih menemukan beberapa hambatan yang berkaitan dengan adat istiadat dan juga "taboo". Beberapa strategi yang dilakukan oleh pendamping adalah Pengulangan materi pelatihan, sehingga memakan waktu, pendamping harus memahami acara kemasyarakatan dan adat masyarakat, pendamping berusaha melaksanakan kegiatan di luar kampung untuk menghindari kecanggungan warga komunitas karena perbedaan yang ada.

Kata Kunci:

Komunitas adat, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial terbesar yang sampai saat ini masih selalu ada di masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, semakin lama akan menjadi semakin mendesak untuk dilaksanakan sesuai dengan situasi khas masyarakat. Setiap masyarakat, memiliki situasi dan kondisi permasalahan yang berbeda dan dengan demikian mengharuskan upaya pemecahannya juga dituntut untuk memperhatikan kondisi khusus ini. Di Indonesia, kondisi masalah kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa kondisi penting:

Pertama, konsep kemiskinan masih diwarnai oleh pandangan tunggal, yakni “kemiskinan pendapatan” atau “*income-poverty*” (Chambers, 1997). Konsep kemiskinan ini merupakan konsep yang melihat dimensi kemiskinan hanya dari kurangnya pendapatan. Artinya, kemiskinan hanyalah masalah ekonomi yang ditentukan oleh kurangnya pendapatan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedua, pemberdayaan sebagai salah satu pendekatan yang paling kuat dalam mengatasi masalah kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan ini diarahkan untuk menguatkan kemampuan lokal dalam menghadapi kemiskinan. Pendekatan ini

berasumsi bahwa permasalahan kemiskinan hanya dapat dipecahkan dengan memanfaatkan kemampuan lokal. Dengan demikian, program yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan sangat diwarnai oleh kemampuan lokal.

Ketiga, populasi orang miskin di Indonesia masih menampakkan angka yang cukup besar, baik secara absolut maupun relatif, di pedesaan maupun perkotaan. Walaupun Indonesia, pemerintah bersama masyarakat telah menunjukkan upaya yang sangat berhasil dalam mengatasi kemiskinan, dan telah dipublikasi di berbagai laporan pembangunan sosial yang berhasil dalam mengentaskan kemiskinan, ternyata masalah kemiskinan masih menjadi masalah pokok yang harus mendapat perhatian secara lebih terstruktur dan sistematis.

Keempat, kemiskinan merupakan masalah pokok yang mempunyai dampak yang begitu menyebar dan saling kait mengkait satu sama lain, yang berpengaruh pada tatanan sosial kemasyarakatan secara menyeluruh.

Komunitas adat terpencil merupakan salah satu bagian dalam struktur kemasyarakatan Bangsa Indonesia yang belum secara optimal menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Faktor geografis, topografis, dan sosiografis seringkali menjadi kendala yang utama didalam mengakses hasil-hasil pembangunan tersebut. Dapat dipahami jika kemudian

komunitas ini melakukan hampir seluruh upaya pemenuhan kebutuhannya dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri.

Sesuai dengan kondisi tersebut, maka pemanfaatan keterampilan lokal, pengetahuan lokal, tenaga lokal, serta proses-proses lokal sangat strategis dalam memberdayakan komunitas adat terpencil. Untuk melaksanakan pemberdayaan melalui paradigma lokalitas, diperlukan penggerak utama proses pemberdayaan yang berasal dari komunitas yang bersangkutan dengan tujuan utama untuk mengeliminasi berbagai kendala yang ada, mengoptimalkan proses yang dilakukan, serta mendorong pencapaian hasil sesuai dengan target yang ditentukan.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program PKH yang merupakan program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara berkembang.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong

untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya (Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018)

Melalui PKH, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didorong agar memiliki akses serta memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Sebagai suatu program pemberdayaan dan perlindungan masyarakat miskin, maka PKH harus mensinergikan berbagai pendekatan pemberdayaan yang mengutamakan kemampuan dan sumber daya lokal.

Adapun tujuan PKH adalah: (1) meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; (2) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; (3) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; (4) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan; (5) mengenalkan

manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa salah satu tujuan PKH adalah menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.

Urgensi dan kepentingan perubahan perilaku dalam CCT, menurut *A Philosophical Framework for Conditional Cash Transfers*, Jaron Abelson, (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI :2018):

1. Program perlindungan sosial di banyak negara berkembang adalah bagian penting dalam strategi pembangunan.
2. Perlindungan sosial bertujuan mengurangi risiko sosial, meningkatkan kesetaraan, mengurangi kemiskinan karena potensi manfaat jangka panjang perubahan perilaku positif akibat kondisionalitas dalam CCT.

P2K2 merupakan proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadi perubahan perilaku pada KPM. Secara umum P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi keluarga. Adapun Tujuan Khusus P2K2 adalah untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan praktis mengenai kesehatan, pendidikan dan

pengasuhan, ekonomi, dan perlindungan anak.

2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga PKH mengenai kondisi,kebutuhan dan perawatan yang dibutuhkan lansia dan orang dengan disabilitas berat
3. Membangun kesadaran peserta PKH terhadap pentingnya pemenuhan kewajiban dalam bidang kesehatan dan pendidikan dalam PKH
4. Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait pendidikan dan pengasuhan, kesehatan, ekonomi dan perlindungan anak.
5. Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait perawatan dan pemeliharaan terhadap lansia dan orang dengan disabilitas berat
6. Meningkatkan ketrampilan orang tua dalam bidang pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, ekonomi dan perlindungan anak
7. Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengenali potensi yang ada pada diri dan lingkungannya agar dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan

sosial. Sedangkan Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. PKH Akses sebagaimana dimaksud terdiri atas wilayah: (1) pesisir dan pulau kecil; (2) daerah tertinggal/terpencil; atau (3) perbatasan antarnegara.

Pada Tahun 2005 sedikitnya ada 250.000 KK atau 1,1 juta jiwa KAT yang hidup dalam kondisi miskin, hidup terasing dan terpencil, hidup berkelompok dengan jumlah anggota keluarga yang tidak banyak dan sering berpindah tempat tinggal. Survei data pada 26 propinsi di 207 kabupaten, 801 kecamatan, 1.758 desa dan 2019 lokasi masih terdapat 130.031 KK KAT masih menunggu pemberdayaan (Kementerian Sosial RI, 2015). Salah satu desa yang menarik untuk dipahami secara mendalam adalah komunitas adat suku sunda di Kampung Kuta Desa Karang Paningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Pada saat ini Kampung Kuta sudah bukan merupakan komunitas adat terpencil, tetapi merupakan salah satu komunitas adat. Kampung Kuta merupakan salah satu komunitas adat terpencil yang sudah purna bina dari Kementerian Sosial RI. Ketertarikan ini didasarkan pada fakta bahwa komunitas kampung kuta telah berhasil melakukan proses pemberdayaan sendiri serta memiliki beberapa

karakteristik komunitas sebagai berikut : 1) mempunyai lokalitas atau tempat tinggal (wilayah tertentu), 2) mempunyai tempat tinggal tetap dan permanen, 3) mempunyai ikatan solidaritas yang kuat sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggalnya. (Netting & Kettner, 2004).

Komunitas adat yang memiliki karakteristik khusus yang bersifat lokal, tradisional, serta memiliki nilai-nilai kekerabatan yang tinggi dan memiliki solidaritas mekanik, seringkali memiliki respon perilaku yang spesifik terhadap program bantuan dari luar. Beberapa kasus bantuan material berupa barang atau alat produksi harus merata untuk semua warga, bukan hanya kelompok yang diklasifikasi sesuai program, dengan demikian, maka bantuan tersebut sulit didistribusikan kepada warga dan akhirnya menjadi barang pajangan yang tidak dapat digunakan. Berbagai kesulitan ini bersumber dari benturan nilai yang berbeda antara nilai dan prinsip dalam substansi program dengan nilai lokal yang sangat spesifik.

Berdasarkan gambaran tersebut peneliti tertarik melakukan studi kualitatif tentang model implementasi pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan di Komunitas Adat Kampung Kuta, Desa Karangpaningal, Kabupaten Ciamis. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan

pengembangan model P2K2 PM PKH di Komunitas Adat Terpencil.

Penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan implementasi pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan di Komunitas Adat Kampung Kuta, Desa Karangpaningal, Kabupaten Ciamis. Penelitian terutama difokuskan pada pemahaman tentang sejauhmana aktivitas KPM PKH dalam berpartisipasi pada P2K2. Sesuai dengan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan di Komunitas Adat Kampung Kuta, Desa Karangpaningal, Kabupaten Ciamis. Tujuan ini dapat diurai menjadi beberapa sub tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan proses implementasi P2K2 PM PKH di komunitas adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.
2. Mendeskripsikan Teknik penguatan keterlibatan KPM dalam implementasi P2K2 PKH di komunitas adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kec Tambaksari Kabupaten Ciamis.
3. Mendeskripsikan dukungan masyarakat dalam implementasi P2K2 PM PKH di komunitas adat Kampung Kuta Desa

Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

4. Mendeskripsikan hambatan dalam implementasi P2K2 PM PKH di komunitas adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.
5. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam mengurangi hambatan dalam implementasi P2K2 PM PKH di komunitas adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

Pemberdayaan sebagaimana dikemukakan oleh Kartasmita (1996) adalah “ upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap individu pada esensinya sudah memiliki daya/power, yang dibutuhkan adalah membantu agar individu tersebut mampu mengolah dan mengembangkan daya yang dimiliki sehingga mencapai kemajuan.

Rappaport dalam DuBois dan Miley (1992) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu cara dimana orang, organisasi, maupun komunitas memperoleh penguasaan atas kehidupannya sendiri. Pendapat tersebut mengandung pengertian bahwa orang memiliki hak untuk membuat penentuan atas kehidupannya sendiri serta

turut serta secara demokratis dalam kehidupan komunitasnya sendiri. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang memberikan peluang bagi aktor utamanya untuk dapat mengungkapkan aspirasi mereka, memperoleh sumber baik individu, organisasi maupun komunitas.

Konsep pemberdayaan erat kaitannya dengan suatu pandangan yang menekankan pentingnya kekuatan sendiri dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini tergambar secara lengkap dalam "*Strength Perspective*" yang dikemukakan oleh Saleebey (1992). Oleh karena itu beberapa definisi pemberdayaan juga ditekankan pada proses-proses ini. Proses ini tidak menonjolkan proses pemberian kekuatan dari luar ke dalam masyarakat, melainkan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat itu sendiri. Pihak luar hanya dipandang sebagai pembantu, pendorong, maupun fasilitator. Yang penting adalah proses yang dilakukan mampu mengaktifkan seluruh komponen dalam masyarakat sehingga memiliki keberdayaan yang kuat. Proses pemberdayaan seperti ini lebih menonjolkan pentingnya proses-proses yang terjadi dalam komunitas sehingga mereka memiliki keberdayaan yang sesungguhnya. Dengan demikian proses yang dilakukan oleh orang luar kepada komunitas lokal itu sendiri hanya perlu dilakukan jika

proses tersebut mengalami hambatan yang cukup berarti.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ife (1995:182) yang menjelaskan bahwa "*empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge and skill to increase their capacity to determine their own future and to participate in and affect the life of their community.*" Pemberdayaan sebagai sarana untuk memberikan orang dengan sumber-sumber, kesempatan-kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga dapat menentukan masa depannya dan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas mereka.

Pada kesimpulannya, suatu komunitas dipandang sebagai suatu organisme hidup serta berkembang, dimana masing-masing organ dalam komunitas tersebut memiliki fungsi satu sama lain yang berbeda, yang saling melengkapi dan bergantung, tumbuh dan berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa masing-masing organ tersebut memberikan pemberdayaan kepada organ-organ lainnya dalam komunitas tersebut agar tetap hidup, berkembang, dan kuat. Organ-organ ini sangat berbeda dan bervariasi antara satu komunitas dengan lainnya, yang dapat berupa orang sebagai anggota komunitas, institusi, pranata sosial, termasuk budaya, norma, maupun adat. Dengan demikian, beberapa konsep seperti "*Learning*

from each other”, “*gaining power from each other*”, serta “*mutual process*” merupakan konsep kunci dalam proses pemberdayaan. Pemberdayaan sama sekali bukan berarti proses pemberian daya dari pihak luar kepada komunitas tertentu, melainkan komunitas sendiri yang mengenal dan memanfaatkan, dan meningkatkan daya yang ada agar efektif untuk dirinya sendiri. Kemampuan diri komunitas itu sendiri merupakan fokus perhatian proses pemberdayaan, sedangkan pihak luar bukan faktor utama yang penting.

Dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, terdapat suatu sistem yang kompleks dalam pelaksanaannya. Terdapat berbagai pelaku, baik organisasi, institusi pelayanan, maupun sumber daya yang digunakan. Baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah, berkoordinasi untuk saling bekerjasama untuk berbagi sumber daya. Sistem ini dapat berupa lembaga donor, yang memberikan dukungan finansial, para perencana program yang merancang kegiatan, lembaga penelitian yang melakukan studi awal tentang situasi dan kondisi masyarakat sasaran, organisasi atau lembaga pelaksana program yang menjalankan program kegiatan, serta aktor-aktor kunci yang memberikan pendampingan terhadap masyarakat. Seluruh sub sistem ini memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda-beda satu sama lain. Semua sub sistem ini bukanlah orang lokal, artinya mereka dianggap sebagai pihak luar (*outsider*)

bagi masyarakat sasaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 pihak sebagai pelaku utama dalam proses pemberdayaan, yaitu masyarakat sasaran itu sendiri serta pihak luar (M. Nagahata, 2010)

Pandangan Nagahata sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seki dan Platteau (dalam Bowles & Gintis, 2002) yang mengkaji mengenai masyarakat nelayan di Jepang yang menggambarkan kerjasama erat antara berbagai kumpulan umur yang berbeda dalam meningkatkan ketrampilan yang dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat. Nelayan kelompok yang lebih tua terus belajar dari golongan yang lebih muda dan berpendidikan. Mereka dididik dan dilatih dengan teknologi-teknologi baru dalam penangkapan ikan. Proses ini berlangsung secara terus menerus dan berberhasil meningkatkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat.

Seki dan Platteau juga menjelaskan bahwa insider atau pihak masyarakat itu sendiri adalah pelaku utama pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penerimaan suatu program oleh masyarakat lokal akan sangat penting dalam proses pemberdayaan.

Pertanyaannya, siapa yang menjadi pihak utama yang paling berperan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut? Dan bagaimana penolakan yang terjadi jika dilakukan oleh pihak luar? Untuk menjelaskan situasi tersebut, M. Nagahata

(2010) mencontohkan dalam dua kasus pemberdayaan masyarakat yang berbeda. Kasus pertama terjadi di Desa Ijobalit di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat yang terjadi di tahun 1960. Masyarakat desa berupaya untuk mengairi lahan kering desa mereka dengan cara membendung sungai ada di dekat daerah tersebut. Mula-mula dilakukan dengan teknik yang sangat sederhana menggunakan tumpukan batok kelapa yang banyak terdapat di desa tersebut. Berulang kali usaha tersebut gagal, akan tetapi mereka tidak berhenti berusaha. Sampai akhirnya, salah satu anak kepala desa yang menempuh pendidikan tinggi teknik sipil di Bandung, merancang teknik pembendungan sungai secara lebih baik. Tidak hanya merancang secara teknis, mahasiswa ini juga menggandeng lembaga donor untuk ikut membantu memberikan dukungan finansial serta merancang program secara lebih teliti. Masyarakat desa menganggap bahwa pelaku utama pemberdayaan masyarakat tersebut adalah orang lokal, yaitu salah satu warga yang mengikuti pendidikan yang dimanfaatkan untuk membangun desa. Walaupun terdapat keterlibatan lembaga donor, mereka dianggap memiliki karakteristik yang sama, yaitu diminta oleh orang lokal untuk membantu. Di sini terlihat jelas, bahwa pelakunya adalah orang lokal. Masyarakat menerima sistem ini dan memberikan dukungan tenaga secara penuh.

Berbeda dengan kasus yang terjadi di sebuah desa di Tolitoli, Sulawesi Tengah pada tahun 2000. Masyarakat desa telah lama menggunakan sarana tangkap yang tidak bersahabat dengan lingkungan. Sarana tangkap yang berupa bom sudah lama digunakan oleh masyarakat. Bom ini akan menghancurkan biota laut, yang pada akhirnya akan menurunkan produksi ikan di laut, yang pada akhirnya juga mengurangi pendapatan nelayan. Selain penurunan hasil tangkapan nelayan, bom juga berpengaruh terhadap rusaknya lingkungan akibat abrasi pantai. Pada kasus kedua ini, akhirnya, pemerintah kabupaten mengambil langkah untuk mencegah kerusakan lingkungan serta penurunan hasil tangkapan yang berakibat pada kemiskinan nelayan, dengan memberikan penyuluhan secara besar-besaran untuk mencegah penggunaan bom. Dalam kasus ini, warga masyarakat merasa bahwa pihak pemerintah telah mencampuri kehidupan mereka yang sudah berlangsung turun temurun, sehingga mereka dengan tegas menolak intervensi pemerintah daerah.

Kedua kasus tersebut terjadi pada masyarakat yang memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu masyarakat tradisional yang memiliki hubungan sosial sangat erat. Respon terhadap keterlibatan pihak luar nampak sangat berbeda. Nagahata (2010) juga menjelaskan bahwa kehidupan sosial yang erat antar warga juga menjadi pendorong untuk

menimbulkan penolakan. Kehidupan masyarakat yang erat dipandang sebagai sebuah keluarga, sedangkan pihak luar adalah pihak luar yang ingin mencampuri kehidupan keluarga tersebut.

Dalam kasus pertama terlihat jelas bahwa sikap penduduk terhadap penilaian kepada pihak luar sangat terbuka dan positif. Program yang diberikan dari luar masyarakat sangat dipengaruhi oleh penerimaan dan sikap positif warga masyarakat lokal. Jim Cavaye menjelaskan bahwa modal sosial yang tercipta dalam suatu masyarakat, dapat menjadi sumber penggerak bagi masyarakat dalam mencapai tujuan, tetapi modal sosial yang erat, khususnya modal sosial bonding akan berperan sebagai penghalang bagi masuknya program dari luar (Jim Cavaye, 2001)

Perbedaan budaya suatu komunitas yang spesifik dengan budaya masyarakat luas secara umum meliputi perbedaan etnik, rasial, serta perbedaan adat tertentu yang sangat spesifik (Lum, Dalam DuBois, 1996). Perbedaan budaya secara spesifik dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok adat tertentu yang ada dalam masyarakat serta membedakan masyarakat yang bersangkutan dengan masyarakat lain yang lebih luas. Perbedaan budaya komunitas adat ini ditentukan dengan cara memahami sampai sejauh mana perilaku anggota komunitas tersebut diatur, dibimbing, ditetapkan, serta

distrukturisasi melalui suatu pemahaman tertentu

Konsep etnisitas merujuk pada populasi dari suatu komunitas lokal kecil yang berbeda dan diikat oleh suatu sifat, ciri, maupun kebiasaan bersama. Etnisitas seperti ini meliputi perbedaan-perbedaan budaya serta etos budaya tertentu, seperti nilai-nilai, harapan-harapan, serta simbol-simbol kelompok. Sesuai dengan pendapat Hardwood (Lum, dalam DuBois, 1992), kelompok-kelompok etnis atau juga komunitas adat disatukan oleh ikatan sosial yang asli milik bersama, suatu identitas etnik tersendiri, serta standar perilaku bersama yang membentuk keyakinan maupun perilaku individu anggota komunitas yang bersangkutan. Dari pendapat Hardwood tersebut jelas tergambar bahwa perilaku serta keyakinan-keyakinan anggota komunitas secara individual akan sangat ditentukan oleh ikatan sosial. Ikatan ini terpelihara dengan baik dalam suatu komunitas yang kurang berinteraksi dengan lingkungannya secara luas. Demikian pulalah yang terjadi dalam Komunitas Adat..

Sejalan dengan perspektif struktural dalam sosiologi, status minoritas yang menjadi ciri dari komunitas etnis (dan juga komunitas adat) akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial ekonomi, budaya, serta penerimaan sosial (Schlesinger, dalam DuBois, 1992). Dalam pengertian ini,

minoritas yang berlaku dalam komunitas adat akan merujuk pada kelompok atau komunitas yang memiliki akses rendah terhadap “Power”. Komunitas seperti ini memiliki berbagai karakteristik ikutan seperti stratifikasi sosial yang cukup kuat, kemiskinan, ketidakmampuan, serta karakteristik sosial lainnya yang menyebabkan mereka kurang memiliki keberdayaan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai Model Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Penerima Manfaat (P2K2 PM) Program Keluarga Harapan (PKH) Di komunitas adat Kampung Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilakukan dengan Penelitian Kasus atau *Case Studies*.
Latar Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah berbagai sumber yang dapat memberikan informasi berkenaan dengan masalah Penelitian. Sumber data ditentukan secara *purposive*. Sampling *purposive* dilakukan pada waktu peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*). Caranya yaitu, peneliti memilih seorang tertentu yang dipertimbangkan akan

memberikan data yang diperlukan; setelah itu berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya, peneliti boleh menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap (*serial selection of sample units*). Unit sampel yang dipilih semakin lama semakin terarah sejalan dengan semakin terarahnya fokus Penelitian (*continuous adjustment of “focusing” of the sample*) (Alston, M. & Bowles W. :2003). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Penamping PKH, Pekerja Sosial Supervisor PKH, Pendamping KAT, dan Tokoh Adat di Kampung Kuta.

Untuk mengungkap informasi secara lengkap, data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu diskusi kelompok terfokus, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Wawancara Mendalam untuk mendapatkan data subyektif yang mendalam, Observasi Partisipatif, untuk menangkap fenomena obyektif yang nampak pada aktivitas keseharian yang dapat teramati, Diskusi Kelompok Terfokus untuk memperoleh data yang perlu dipercepatkan terlebih dahulu, sehingga masing-masing peserta dapat melengkapi informasi yang dimilikinya serta lebih mampu memberikan penilaian yang rasional dan realistis dalam

melihat permasalahan penelitian, serta Studi Dokumentasi berbagai laporan atau catatan yang relevan dengan masalah penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara, selanjutnya diproses melalui, pencatatan, pengetikan, dan analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap Penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya jenuh". Analisis data dilakukan dengan menggunakan tahapan: 1) Reduksi data (*data reduction*), dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. 2) Penyajian data (*data display*) adalah menyajikan data dalam bentuk teks naratif. 3) Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), Proses penarikan kesimpulan yang dilakukan terhadap data yang telah dikutip melalui berbagai teknik, dan dari berbagai sumber yang dicatat dalam catatan lapangan. Kemudian data tersebut dilakukan proses reduksi, dan kategori datanya disajikan dalam teks naratif. Penarikan kesimpulan juga mempertimbangkan bukti-bukti yang sah

dan konsisten sehingga kesimpulan yang bisa dipercaya.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi

Kampung Kuta merupakan salah satu dusun di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, Dusun ini meliputi dataran tinggi yang berada di sebuah cekungan yang dikelilingi oleh tebing-tebing (yang disebut kuta) dengan kemiringan yang cukup tajam. Topografi Dusun atau kampung Kuta ini berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut yang masih memiliki alam nyaman dan memiliki temperatur berkisar antara 28 – 30 derajat celcius. Kampung Kuta merupakan suatu kampung yang bersifat tradisional dan memelihara lingkungan alam secara baik, hutan yang sangat terawat, dan lingkungan persawahan tadah hujan yang subur.

Kampung Adat Kuta juga merupakan satu-satunya kampung di Kabupaten Ciamis yang masih memiliki kehidupan sosial tradisional yang memelihara kearifan lokal secara kuat. Kehidupan sosial tradisional yang mempertahankan kearifan lokal ini sangat berpengaruh terhadap kebiasaan dan aturan dalam kehidupan sosial masyarakat. Adat istiadat sangat teguh dipertahankan oleh masyarakat. Salah satu adat yang dipertahankan adalah dalam memelihara lingkungan dan pemukiman. Masyarakat

meyakini bahwa perumahan dan pemukiman harus dibangun melalui tatanan aturan sosial atau adat yang sangat ketat. Masyarakat harus menjaga bahwa bangunan perumahan harus dibangun dengan sistem rumah panggung yang terbuat dari bambu dan kayu. Masyarakat tidak diperkenankan untuk membangun bangunan apapun dengan memanfaatkan bahan yang memiliki unsur tanah seperti semen, tanah, batu. Dengan demikian, tidak terdapat rumah yang terbuat dari tembok, beton, dan atap genting (Dwi, Aribowo & Favourita: 2004).

Masyarakat Kampung Kuta memiliki suatu lingkungan hutan yang sangat dianggap keramat oleh warga. Hutan ini disebut sebagai keramat atau hutan larangan. Hutan larangan ini merupakan hutan yang penuh mengandung larangan adat atau tabu. Masyarakat menganggap bahwa hutan larangan ini merupakan tempat suci yang harus dijaga agar tidak terganggu oleh kehidupan modern yang dianggap kacau. Hutan ini diperlakukan seperti layaknya sebuah tempat peribadatan, atau tempat suci yang terawat dengan baik. Tempat suci ini memiliki beberapa pantangan seperti tidak boleh menebang pohon mematahkan ranting pohon dan merusak sumber daya hutan lainnya, memakai baju dinas, memakai perhiasan emas, memakai baju hitam-hitam, membawa tas, memakai alas kaki, meludah dan mengeluarkan suara keras ketika berada di kawasan hutan

keramat tersebut. Bahkan, Kuncen hutan larangan tersebut menyarankan orang yang hendak memasuki hutan larangan untuk berwudhu terlebih dahulu di air mancur yang ada di pinggir hutan tersebut.

Masyarakat Kampung Kuta tinggal dalam suatu kelompok pemukiman kecil dan sederhana, dimana rumah mereka yang relatif homogen dan memiliki jarak antar rumah yang cukup berdekatan. Tidak nampak perbedaan strata sosial masyarakat jika dilihat dari bentuk dan kondisi rumah. Pemukiman kecil dan berdekatan ini sangat menunjang bagi berlangsungnya interaksi sosial secara erat antar warga. Wakil Ketua Adat sekaligus sesepuh Kampung Kuta menjelaskan, bahwa masyarakat Kampung Kuta merupakan masyarakat tradisional yang masih sangat sederhana. Masyarakat sederhana ini tidak memiliki pikiran yang beraneka ragam. Mereka sangat patuh terhadap adat. Adat adalah aturan yang sangat penting dalam mengelola kehidupan masyarakat. Adat merupakan aturan yang sedikit lebih rendah dari agama, dengan demikian harus dipatuhi. Salah satu ancaman terbesar dari kekuatan adat adalah masuknya nilai budaya luar yang mengintervensi kekuatan adat. Mata pencaharian masyarakat Kampung Adat Kuta sejak dulu sampai saat ini tidak mengalami banyak perubahan. Kegiatan masyarakat Kampung Kuta pada umumnya berkebun, bertani dan beternak.

Kampung Kuta memiliki dua jenis sistem kemasyarakatan. Dua sistem kemasyarakatan ini adalah sistem pemerintahan Secara umum dan sistem adat. Sistem pemerintahan, seperti juga desa atau kampung lainnya, memiliki struktur yang tidak berbeda dengan struktur pemerintahan dusun sebagai bagian dari pemerintahan desa. Struktur pemerintahan dusun ini dipimpin oleh kepala dusun yang membawahi RW, dalam hal Kampung Kuta adalah RW 04 yang terdiri dari 4 RT, yaitu RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04. Struktur pemerintahan dusun ini terkait dengan sistem pemerintahan desa. Jadi, Kepala Dusun ini memimpin sistem administratif pemerintahan desa di Kampung Kuta. Kepala dusun yang sering disebut lurah ini tidak memiliki otoritas apapun yang berkaitan dengan adat. Kepala dusun hanya menjalankan tugas untuk menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. Kepala dusun ini sama sekali bukan panutan adat, bahkan juga bukan panutan sosial, melainkan masyarakat biasa.

Pemimpin sosial kemasyarakatan yang paling dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat adalah "*Kuncen*". Kuncen ini lebih disegani terutama untuk kegiatan yang bernuansa sosial, kemasyarakatan, adat, serta hal-hal yang berkaitan dengan spirit kebersamaan yang ditunjang oleh keyakinan bersama. Kuncenlah yang memelihara kelestarian adat istiadat di Kampung Kuta. Kuncen memberikan petunjuk dan sosialisasi

kepada masyarakat tentang larangan atau pamali. Kuncen ini secara operasional dibantu oleh Ketua Adat. Ketua adat terutama membantu Kuncen dalam menjalin hubungan dengan masyarakat secara luas, akan tetapi pengambilan keputusan tetap ada pada tangan Kuncen, bahkan secara teknis, ketua adat ini hanya bersifat formalitas seperti yang dipersyaratkan untuk menerima penghargaan Kalpataru oleh Presiden Megawati tahun 2002.

Dalam pranata sosial suatu masyarakat, peran dan status diatur untuk melaksanakan aktivitas pranata tersebut. Pranata sosial merupakan rangkaian sosial yang berisi tatanan dan aturan normatif yang menggambarkan hubungan seluruh konstelasi norma-norma dan peranan-peranan yang ada yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan.

2. Proses implementasi P2K2 KPM PKH di komunitas adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

P2K2 PKH dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan PKH. P2K2 di Kampung Kuta Desa Karang Paningal baru dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan dengan tingkat kehadiran 100%. Beberapa tema yang muncul dari hasil wawancara dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Dilakukan setiap bulan secara bergiliran di rumah anggota kelompok. Pertemuan P2K2 dalam PKH dilakukan di rumah warga secara bergiliran, akan tetapi tidak dilakukan di Kampung Kuta, melainkan dilakukan di luar kampung. Hal ini dilakukan untuk menghindari munculnya rasa iri dari masyarakat Kampung Kuta. Perasaan iri muncul karena masyarakat Kampung Kuta merupakan masyarakat kecil dan bersifat homogen, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Dengan demikian mereka menganggap bahwa PKH justru membuat suatu perbedaan yang mencolok, yaitu yang menerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan. Karakteristik masyarakat dari segi kondisi perekonomian relatif sama, sehingga mereka sulit menerima pemahaman mengapa ada yang diberi bantuan dan yang tidak diberi bantuan, padahal kondisi mereka relatif sama. Satu-satunya pembeda adalah komponen PKH yang disandang oleh informan. Hal ini disampaikan oleh seluruh informan yang berasal dari anggota KPM. Informan Ras menjelaskan : *warga di dieu aya nu meunang bantuan ti pamarentah, ari tatangga heunteu meunang bantuan. Tah ieu nu sok jadi ngarasa teu enak jeung tatangga. Warga atawa tatangga sok nganggap pamerintah pilih kasih atawa wawarehan.*

Artinya:

(Kami mendapat bantuan dari pemerintah, sedangkan tetangga tidak mendapat bantuan. Hal inilah yang menjadi keadaan yang membuat kami merasa kurang enak dengan tetangga. Mereka selalu memandang bahwa kami lebih diperhatikan dibandingkan mereka).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa warga masyarakat yang mendapatkan PKH merasa tidak enak. Memang masyarakat yang tidak melakukan protes, karena protes tidak dikenal dalam masyarakat Kampung Kuta. Akan tetapi, perasaan ini merupakan perasaan yang sangat penting, karena dengan demikian berarti mereka melanggar nilai kebersamaan masyarakat. Masyarakat memiliki suatu ikatan solidaritas mekanis yang sangat erat, tetapi dengan PKH, maka ketidak samaan perlakuan tersebut sangat berpengaruh terhadap solidaritas tersebut.

b. Hubungan sosial kekerabatan membuat anggota saling bertanggung jawab, selalu tepat waktu.

Pelaksanaan P2K2 berjalan dengan sangat baik. Hal ini disebutkan sebagai suatu keunggulan yang dimiliki oleh warga masyarakat Kampung Kuta. Masyarakat Kampung Kuta yang memiliki ikatan sosial yang tinggi menjadi pendorong yang kuat untuk menyelenggarakan P2K2 PKH.

Kesediaan dan kehadiran anggota kelompok juga sangat tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh kontrol sosial antar anggota kelompok yang sangat kuat.

Kontrol sosial yang ada dalam masyarakat adat Kampung Kuta yang sangat kuat inilah yang mengendalikan proses komunikasi. Semua anggota dapat berkomunikasi secara terbuka, dan akhirnya membangun perasaan masing-masing anggota bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang utuh. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memelihara keutuhan kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh informan yang merupakan anggota masyarakat : “ *Urang dieumah kararenal, terang naon nu dirasakeun ku dulur. Teu aya hiji hal oge anu disumputkeun, jadi bebas nyaritakeun naon oge di kulawarga, jeung ngarti kana kabutuhan masing-masing. Ngarti kamampuan masing-masing, ngarti kakurangan masing-masing, jadi bisa babareungan ngabahas naon bae oge anu jadi masalah jeung naon bae nu dipikahayang keur majukeun warga di dieu.* Artinya: (Kami saling kenal, saling tahu apa yang dirasakan oleh keluarga. Kami tidak memiliki apapun yang perlu disembunyikan, jadi ya kami bebas menceritakan apa yang terjadi di dalam keluarga, dan apa kebutuhan kami. Kami tahu kemampuan kami, kami tahu apa kelemahan kami, jadi kami saling kerjasama untuk membahas apapun yang

menjadi masalah dan apapun yang diharapkan untuk memajukan keluarga kami).

Pendamping PKH Kecamatan Tambaksari menyatakan: Salah satu keunggulan warga masyarakat adat Kampung Kuta dibandingkan dengan warga masyarakat lain adalah kemauan mereka dalam menghadiri pertemuan kelompok. Mereka sangat rajin untuk menghadiri pertemuan kelompok. Selain itu, rasa persaudaraan antar anggota kelompok yang tinggi sangat memudahkan komunikasi.

Dari beberapa pernyataan tersebut terlihat bahwa salah satu karakteristik penting dalam masyarakat tradisional yang memiliki solidaritas mekanik adalah kemudahan dan keterbukaan komunikasi antar warga. Dengan demikian pelaksanaan P2K2 di desa Karangpaningal, khususnya komunitas adat Kampung Kuta berlangsung secara baik dengan dilandasi oleh keterbukaan komunikasi dan interaksi sosial.

3. Teknik penguatan keterlibatan KPM PKH dalam implementasi P2K2 di komunitas adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

Tidak ada teknik khusus dalam implementasi P2K2 di komunitas adat Kampung Kuta. Mereka bukanlah masyarakat yang tertutup, mereka adalah masyarakat yang terbuka. Pendamping PKH Kecamatan Tambaksari menyatakan: “Keterbukaan dan

kemudahan dalam komunikasi antar anggota kelompok merupakan suatu ciri yang sudah melekat dalam masyarakat”. Keterbukaan dan kemudahan komunikasi ini merupakan satu keunggulan utama yang harus ada dalam memfasilitasi kelompok. Kelompok yang beranggotakan individu yang memiliki hubungan emosional dan suasana batin yang sama akan sangat membantu dalam menciptakan interaksi sosial dan kerjasama yang kuat. Dengan demikian, P2K2 di Kampung adat Kuta memiliki suasana kerjasama yang sangat baik.

Kesulitan terbesar yang dialami dalam pelaksanaan P2K2 adalah jika materi sulit diterapkan akibat berbenturan dengan adat. Misalnya soal kesehatan, khususnya tentang jamban keluarga yang tidak mungkin dilaksanakan di komunitas adat Kampung Kuta. Pendamping menjelaskan sebagai berikut: “Kesulitan terbesar adalah kesulitan dalam menjelaskan tentang substansi yang bertolak belakang dengan adat setempat. Misalnya yang berkaitan dengan pembangunan jamban keluarga yang tidak diijinkan oleh adat setempat. Padahal, jamban keluarga ini merupakan salah satu substansi yang harus disampaikan kepada masyarakat setempat”.

Beberapa teknik yang diselenggarakan dalam pertemuan P2K2 adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian materi yang dilakukan oleh pendamping dengan menggunakan sistem ceramah langsung.
- b. Diskusi dan dialog langsung dengan pendamping.
- c. Dialog dan diskusi antar anggota kelompok.
- d. Penggunaan budaya dalam pertemuan kelompok dan pelatihan.
- e. Pemanfaatan tokoh adat untuk menguatkan penyampaian substansi.

Teknik-teknik yang dilakukan dalam pelaksanaan P2K2 ini dilakukan secara selektif, dan yang sangat sering dilakukan adalah teknik dialog antara pendamping dengan anggota kelompok dan antara anggota kelompok lainnya. Sesekali memanfaatkan tokoh adat untuk terlibat aktif dalam P2K2.

Pendamping PKH menjelaskan bahwa pemberian materi pada modul P2K2 harus disisipi pula dengan pembicaraan lain yang diminati, seperti pembahasan mengenai musim misalnya. Musim penghujan dan musim panen adalah pembahasan yang sangat menarik untuk warga, setelah mereka berdialog dengan terbuka, maka mereka sudah dapat lebih mudah untuk menerima topik bahasan dari setiap modul.

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pendamping harus memiliki kreativitas yang harus dikembangkan sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi kelompok. Pendamping harus memahami berbagai hal

yang menjadi concern masyarakat, dan mulai masuk dari kondisi tersebut. Untuk memahami berbagai hal yang terkait dengan karakteristik masyarakat, termasuk budaya dan kebiasaan, pendamping sedapat mungkin berasal dari masyarakat sekitar.

Pelibatan tokoh adat dalam mendorong partisipasi juga harus dicermati dengan baik. Pendamping menjelaskan: “Tokoh adat juga tidak bisa dilibatkan terlalu sering, karena ini berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan untuk menghindari rasa iri dari anggota masyarakat yang tidak mendapat program PKH”. Masyarakat anggota kelompok akan mendapat manfaat positif dari keterlibatan tokoh adat, tetapi masyarakat juga jangan terdorong untuk berpikir bahwa ketua adat atau perangkat adat hanya memperhatikan sebagian warga masyarakat saja, tetapi tidak kepada masyarakat lainnya dari Komunitas Adat Kuta. Untuk sosialisasi awal bisa melibatkan perangkat adat, tetapi untuk kegiatan selanjutnya sebaiknya tidak melibatkan tokoh adat atau perangkat adat. Dari pandangan tersebut terlihat bahwa pelibatan tokoh adat sangat berpengaruh terhadap kemudahan dalam berdialog dengan warga atau anggota kelompok, tetapi memiliki kekurangan, karena akan mendorong munculnya perasaan tidak baik dari warga masyarakat lainnya.

Teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan anggota KPM ini

harus sesuai dengan kondisi dan karakteristik anggota. Kampung adat Kuta yang memiliki anggota masyarakat yang masih sangat tradisional dan memiliki tingkat interaksi yang sangat terbuka menjadi suatu pendorong kemudahan dalam komunikasi antar anggota, dengan demikian, keterlibatan anggota ini tidak terlalu membutuhkan pelaku dari luar. Mereka cukup hanya difasilitasi melalui komunikasi secara terbuka dan tidak menggurui atau *directive*.

4. Dukungan masyarakat dalam implementasi P2K2 KPM PKH di komunitas adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

Dukungan dapat dipahami sebagai dukungan sosial emosional yang diberikan oleh sesama anggota masyarakat, baik yang memperoleh manfaat program P2K2 KPM PKH maupun yang tidak, dukungan yang diberikan oleh perangkat adat, serta dukungan yang diberikan oleh warga lain di luar komunitas adat Kampung Kuta. Dukungan yang diberikan oleh sesama anggota masyarakat. Dukungan ini erat kaitannya dengan solidaritas mekanik yang dimiliki oleh komunitas adat Kampung Kuta. Mereka memiliki perasaan dan suasana kebatinan yang sama, dengan demikian akan memberikan dukungan yang sangat kuat satu sama lain. Pendamping PKH Kecamatan Tambaksari menjelaskan: “Masyarakat Kampung Kuta

saling kenal mengenal, jadi ya... mereka akan memberikan dukungan dengan sangat kuat. Mereka akan saling membantu satu sama lain. Tidak ada satupun warga masyarakat yang tidak peduli kepada sesama warga. Mereka saling memahami masalah yang dialami oleh seluruh warga, mereka memahami apa yang dibutuhkan, dan mereka juga memahami apapun yang tidak mampu mereka lakukan. Jadi mereka akan saling bantu satu sama lain”.

Kondisi seperti yang dijelaskan di atas memperlihatkan bahwa bantu-membantu, dialog, dan keterbukaan komunikasi antar warga, khususnya yang menjadi anggota KPM, sangat terlihat dengan jelas. Hal ini sudah diuraikan pada hasil penelitian pada problematik 2. Dukungan atau lebih tepat disebut sebagai tanggapan yang bersifat negatif dilakukan oleh anggota masyarakat yang tidak memperoleh manfaat dari PKH. Masyarakat bersikap masa bodoh terhadap warga yang mendapat manfaat. Sikap ini dirasa sangat mengganggu bagi warga yang mendapat manfaat. Perasaan sehati, senasib dan sekeluarga dimiliki oleh warga. Tetapi dengan adanya bantuan yang berupa PKH, maka masyarakat menjadi sangat terganggu.

Masyarakat dieumah sepertos janten sakulawarga, teu aya anu benten dina kaayaan. Janten, upami hiji warga ngengingkeun bantosan ti pamarentah, warga anu lain oge kedah kenging. Pamarentah kedah adil dina babagi program. Lamun aya

beda, pasti wargi oge protes. Urang anu ngengingkeun ieu anu ngarasa teu raos hate. Soalna batur teh sok bebeja ka sanesna, lamun urang ngengingkeun anu beda.

Kami sudah menjadi satu keluarga, tidak ada yang berbeda dalam keadaan kami. Jika satu warga mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka warga lainnya juga harus mendapat bantuan tersebut. Jika ada perbedaan dalam perlakuan, maka pasti memberikan protesnya. Kami ini yang memperoleh bantuan inilah yang merasa tidak enak hati. Penjelasan ini sangat berkaitan dengan kebersamaan antar warga. Hubungan sosial ini menjadi karakteristik dasar dari komunitas adat Kampung Kuta. Jika hubungan sosial yang sangat positif ini kemudian rusak akibat masuknya program bantuan sosial dari luar, maka karakteristik utama ini akan terganggu.

Perasaan “ atau “tidak enak hati” atau menurut mereka “*teu raos hate*” merupakan suatu ungkapan yang memiliki makna yang sangat dalam. “*Teu raos hate*” ini berkaitan dengan suasana hati, suasana kebatinan yang senasib dan sepenanggungan. Jika mereka merasa tidak enak hati, berarti suasana kebatinan mereka yang menjadi tumpuan hidup bermasyarakat akan terancam. Karena kesatuan hati dan perasaan inilah yang menjadi perekat hidup bermasyarakat yang utama dalam masyarakat adat Kampung Kuta. Durkheim, 1893 menyebutnya sebagai *collective conscience* atau *collective*

consciousness. *collective conscience* merupakan seperangkat keyakinan, gagasan, serta sikap moral yang berperan sebagai kekuatan pemersatu dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik. Jika kesadaran kolektif sebagai pemersatu masyarakat ini terancam, maka persatuan warga juga akan terancam, artinya kebersamaan sebagai tonggak kehidupan akan terancam pula. *Collective conscience* ini merupakan struktur sosial masyarakat adat yang menjamin berdirinya masyarakat, jadi ancaman atas *collective conscience* berarti juga ancaman terhadap struktur sosial warga masyarakat.

Reaksi atau tanggapan negatif secara *overt* memang tidak nampak atau tidak ditampilkan secara jelas. Tanggapan negatif hanya ditampilkan dalam bentuk sikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Sikap ini juga tidak dapat diabaikan, karena sikap masa bodoh merupakan suatu sikap yang tidak ada dalam masyarakat dengan tipe solidaritas mekanik. Jika sikap ini berkembang terus, atau minimal menetap dalam masyarakat, maka solidaritas mekanik dari komunitas adat Kampung Kuta juga sangat terganggu.

Ancaman rusaknya tatanan sosial dalam masyarakat adat yang memiliki rasa persaudaraan yang tinggi mendorong berubahnya masyarakat, dari solidaritas mekanik kepada solidaritas organik. Perubahan ini, lambat laun akan menjadi kekuatan perubahan sosial di masyarakat.

5. Hambatan dalam implementasi P2K2 KPM PKH di komunitas adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

Secara detil, hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi P2K2 di Komunitas Adat Kampung Kuta menghadapi beberapa hambatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hambatan yang berkaitan dengan dukungan dari warga masyarakat yang tidak mendapat pelayanan P2K2. Hambatan ini dirasakan oleh penerima manfaat, khususnya karena adanya hubungan sosial erat yang ada di Kampung Adat Kuta. Mereka memiliki perasaan senasib sepenanggungan yang merupakan wujud nyata dari solidaritas mekanik yang ada. Warga masyarakat yang bukan termasuk dalam KPM PKH merasa tidak dipedulikan oleh pemerintah, dan akhirnya bersikap masa bodoh terhadap program yang berjalan. Sikap masa bodoh ini artinya adalah tidak memberikan dukungan terhadap program.
- b. Hambatan untuk menghadapi perasaan tidak nyaman yang dialami oleh anggota KPM akibat diabaikan oleh warga masyarakat lainnya yang tidak memperoleh P2K2 KPM PKH. Hal ini menjadi penghalang besar dalam

- mendorong keterlibatan anggota KPM dalam mengikuti pertemuan.
- c. Hambatan dalam melibatkan tokoh atau perangkat adat setempat. Tokoh adat atau perangkat adat merupakan tokoh utama dan menduduki posisi sentral dalam Komunitas Adat Kampung Kuta. Perangkat adat ini merupakan tokoh yang dijunjung tinggi oleh warga, dengan demikian, tokoh adat ini harus bersikap adil dan memperhatikan seluruh warga. Implementasi program PKH yang hanya menjangkau sedikit warga, dianggap tidak adil. Dengan demikian tokoh adat juga tidak dapat terlalu banyak terlibat dalam kegiatan P2K2.
 - d. Hambatan yang dialami pendamping dalam memahami kebiasaan warga yang berkaitan dengan musim dan perayaan atau upacara adat. Sulit sekali dalam mengupayakan kegiatan yang mendorong fokus perhatian dari warga atau anggota KPM. Banyak anggota KPM yang tidak hadir karena bersamaan dengan upacara adat atau musim tanam dan panen.
 - e. Hambatan yang berkaitan dengan substansi modul P2K2 yang tidak dapat diterapkan di masyarakat adat Kampung Kuta, karena berbenturan secara langsung dengan adat setempat, khususnya yang berkaitan dengan

kesehatan dan kesehatan lingkungan. Secara adat, seluruh wilayah geografis Kampung Kuta taboo untuk membuat sumur dan jamban keluarga. Sumur dan jamban keluarga tidak diperbolehkan dibangun di wilayah geografis komunitas adat Kampung Kuta. Hal ini sangat sulit sulit, atau tidak mungkin disampaikan dalam P2K2. Padahal kedua substansi modul ini merupakan substansi yang sangat penting. Kedua substansi ini tidak mungkin dilaksanakan di Komunitas Adat Kampung Kuta.

6. Upaya mengurangi hambatan dalam implementasi P2K2 KPM PKH di komunitas adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

Tidak ada upaya khusus dalam implementasi P2K2 di komunitas adat Kampung Kuta. Mereka bukanlah masyarakat yang tertutup, mereka adalah masyarakat yang terbuka. Pendamping PKH Kecamatan Tambaksari menyatakan: “Keterbukaan dan kemudahan dalam komunikasi antar anggota kelompok merupakan suatu ciri yang sudah melekat dalam masyarakat”. Keterbukaan dan kemudahan komunikasi ini merupakan satu keunggulan utama yang harus ada dalam memfasilitasi kelompok. Kelompok yang beranggotakan individu yang memiliki hubungan emosional dan suasana batin yang

sama akan sangat membantu dalam menciptakan interaksi sosial dan kerjasama yang kuat. Dengan demikian, P2K2 di Kampung adat Kuta memiliki suasana kerjasama yang sangat baik.

Kesulitan terbesar yang dialami dalam pelaksanaan P2K2 adalah jika materi sulit diterapkan akibat berbenturan dengan adat. Misalnya soal kesehatan, khususnya tentang jamban keluarga yang tidak mungkin dilaksanakan di komunitas adat Kampung Kuta.

Teknik yang dilakukan dalam mengurangi hambatan pelaksanaan P2K2 ini dilakukan secara selektif, dan yang sangat sering dilakukan adalah teknik dialog antara pendamping dengan anggota kelompok dan antara anggota kelompok lainnya. Sesekali memanfaatkan tokoh adat untuk terlibat aktif dalam P2K2.

Pendamping PKH menjelaskan bahwa pemberian materi pada modul P2K2 harus disisipi pula dengan pembicaraan lain yang diminati, seperti pembahasan mengenai musim misalnya. Musim penghujan dan musim panen adalah pembahasan yang sangat menarik untuk warga, setelah mereka berdialog dengan terbuka, maka mereka sudah dapat lebih mudah untuk menerima topik bahasan dari setiap modul.

Penjelasan tersebut menggambar-kan bahwa pendamping harus memiliki kreativitas yang harus dikembangkan sendiri sesuai

dengan situasi dan kondisi kelompok. Pendamping harus memahami berbagai hal yang menjadi concern masyarakat, dan mulai masuk dari kondisi tersebut. Untuk memahami berbagai hal yang terkait dengan karakteristik masyarakat, termasuk budaya dan kebiasaan, pendamping sedapat mungkin berasal dari masyarakat sekitar.

Pelibatan tokoh adat dalam mendorong partisipasi juga harus dicermati dengan baik. Pendamping menjelaskan: "Tokoh adat juga tidak bisa dilibatkan terlalu sering, karena ini berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan untuk menghindari rasa iri dari anggota masyarakat yang tidak mendapat program PKH. Masyarakat anggota kelompok akan mendapat manfaat positif dari keterlibatan tokoh adat, tetapi masyarakat juga jangan terdorong untuk berpikir bahwa ketua adat atau perangkat adat hanya memperhatikan sebagian warga masyarakat saja, tetapi tidak kepada masyarakat lainnya dari Komunitas Adat Kuta. Untuk sosialisasi awal bisa melibatkan perangkat adat, tetapi untuk kegiatan selanjutnya sebaiknya tidak melibatkan tokoh adat atau perangkat adat.

Upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan anggota KPM ini harus sesuai dengan kondisi dan karakteristik anggota. Kampung adat Kuta yang memiliki anggota masyarakat yang masih sangat tradisional dan memiliki tingkat interaksi yang sangat terbuka menjadi suatu pendorong

kemudahan dalam komunikasi antar anggota, dengan demikian, keterlibatan anggota ini tidak terlalu membutuhkan pelaku dari luar. Mereka cukup hanya difasilitasi melalui komunikasi secara terbuka dan dan tidak menggurui atau *directive*.

KESIMPULAN

Kampung Kuta terdiri atas 112 Kepala Keluarga. Kampung Adat Kuta merupakan satu-satunya daerah di Ciamis yang tetap mempertahankan kearifan lokal. Kearifan lokal ini sangat berpengaruh terhadap kebiasaan dan aturan dalam membangun pemukiman. Masyarakat meyakini bahwa pemukiman harus terdiri dari perumahan yang secara ketat diatur oleh adat yang bahwa masyarakat harus mempertahankan bangunan rumah panggung berbahan dasar kayu dan bambu. Masyarakat *taboo (pamali)* untuk membangun rumah pemukiman berbahan dasar yang mengandung unsur tanah, baik semen, tanah, batu. Selain itu masyarakat Kampung Kuta juga meyakini *taboo* membuat sumur / menggali tanah, *taboo* mengubur jenazah, dan *taboo* membuat tempat sampah. Kampung Kuta juga memiliki hutan keramat yang penuh dengan *taboo* dan diperlakukan sebagaimana tempat suci.

Di Kampung Kuta tidak memiliki masalah kemiskinan, sebenarnya PKH diterapkan, hanya karena mereka memiliki komponen persyaratan PKH, seperti memiliki balita, memiliki anak sekolah, SD, SMP,

SMA, dan atau lansia. Proses implementasi P2K2 KPM PKH dilakukan setiap bulan secara bergiliran di rumah anggota kelompok. Caranya digabung dengan kelompok dari RW lain. Kampung Kuta merupakan RW 04 dari Desa Karang Paningal, Kecamatan Tambaksari. Hal ini dilakukan untuk mengefisiensikan kerja pendamping. Sebenarnya jumlah seluruh KPM Kecamatan Tambaksari adalah 713 KPM, Sedangkan di Kampung Kuta terdapat 10 KPM. Seluruh KPM merupakan ibu-ibu rumah tangga.

Hubungan sosial kekerabatan membuat anggota saling bertanggung jawab, selalu tepat waktu. P2K2 dilakukan dengan cara berkelompok, dengan teknik dialog, diskusi. Pelaksanaan P2K2 ini didampingi oleh Pendamping PKH. P2K2 dilakukan secara partisipatoris. Walaupun dilakukan secara partisipatoris, dan diskusi, sering terjadi kesulitan dalam mendorong anggota untuk terfokus pada topik yang ada dalam modul kegiatan. Mereka lebih tertarik membicarakan berbagai topik kehidupan sehari-hari.

Teknik penguatan keterlibatan KPM PKH dalam implementasi P2K2 dilakukan oleh Pendamping yang berasal dari luar kampung, dengan demikian terdapat sedikit kendala dalam menggiring topik pembicaraan pada fokus yang ditentukan sesuai dengan topik modul P2K2. Kesulitan dalam menarik fokus, mengakibatkan diskusi menjadi melebar pada topik lain yang kurang sesuai

dengan topik, misalnya tentang pertanian, tentang bantuan “nyambungan” pada acara yang akan dilakukan. Teknik yang dilakukan oleh pendamping adalah menekankan pada desakan-desakan formal, mengarah pada penggunaan teknik instruksional, yang didominasi oleh peran pendamping. Proses komunikasi yang terjadi lebih bersifat satu arah, dari pendamping. Dalam pelaksanaannya P2K2 ini melibatkan tokoh adat untuk mengendalikan komunikasi dan kepatuhan anggota. Keterlibatan tokoh adat memiliki dua pengaruh yang menonjol, yaitu menguatkan kepatuhan, tetapi juga membuat diskusi menjadi semakin tidak terbuka, segan, sedikit bersifat formal. Tetapi dapat terjadi kecanggungan akibat kehadiran tokoh normatif. Dalam pelaksanaan P2K2 belum terdapat teknik khusus.

Dukungan masyarakat dalam implementasi P2K2 PM PKH hanya berasal dari tokoh masyarakat, khususnya tokoh adat. Sikap “masa bodoh” ditunjukkan oleh warga yang tidak memperoleh PKH. Hal ini disebabkan oleh fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Kuta merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang homogen. Seharusnya PKH tidak diterapkan di Kampung Kuta. Tidak ada masalah kemiskinan di Kampung Kuta.

Adapun hambatan dalam implementasi P2K2 PM PKH, karena solidaritas mekanik memiliki karakteristik keeratan hubungan

sosial yang tinggi. komunikasi yang sangat terbuka dan bebas, tanggung jawab sosial antar warga yang sangat kuat, kekerabatan yang sangat kuat, Pola pemukiman yang berdekatan dan berkumpul dalam suatu lokasi kampung yang relatif terbatas, pola pekerjaan yang didominasi oleh pertanian dan perkebunan yang sangat terpengaruh oleh musim, sehingga jadwal pertemuan P2K2 sangat ditentukan oleh musim. Tingkat kehadiran sangat rendah pada musim panen dan musim tanam, pada acara kemasyarakatan dan adat. Hal lain yang menjadi hambatan adalah hal taboo, misalnya tentang jamban keluarga. Jamban keluarga juga sangat penting dalam sistem kesehatan lingkungan, padahal Kampung Kuta memiliki taboo membuat jamban dan septic tank. Air Bersih, Jamban hanya terdapat di luar kampung yang letaknya cukup jauh. Taboo ini menunjang kesehatan lingkungan dan masyarakat, tetapi sangat menyulitkan bagi kehidupan masyarakat.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan: Pengulangan materi pelatihan, sehingga memakan waktu, Pendamping harus memahami acara kemasyarakatan dan adat masyarakat, Pendamping berusaha melaksanakan kegiatan di luar kampung untuk menghindari kecanggungan anggota kelompok karena perbedaan yang ada, dan Pendamping

memanfaatkan kekuatan tokoh adat untuk memberikan dukungan.

Berdasarkan temuan hasil penelitian, khususnya yang berkaitan dengan hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan, maka disusun rekomendasi sebagai berikut :

1. Penguatan sosialisasi program yang diarahkan pada kenyataan bahwa program KPM PKH merupakan program yang berkelanjutan, artinya bahwa program ini terus digulirkan secara berkesinambungan, dengan demikian sasaran program juga akan terus bergerak dan berubah secara dinamis. Program ini bukanlah program yang bersifat statis. Program PKH tidak mungkin dilaksanakan untuk seluruh warga masyarakat secara bersamaan. Program ini dilaksanakan tahap demi tahap secara terus menerus, selama komponen program dan karakteristik sasaran masih terdapat di dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah munculnya hambatan yang bersifat struktural. Hambatan struktural adalah hambatan yang mengancam collective conscience yang menyatakan bahwa mereka memiliki kesatuan sosial dan suasana kebatinan yang sama, yang akan terancam oleh ketidak samaan akibat perubahan dan perkembangan sasaran pelayanan.
2. Perlu dibuat program P2K2 KPM PKH yang bersifat khusus atau spesifik. Hal

ini terkait dengan substansi yang dimungkinkan bertentangan dengan adat setempat. Tidak mungkin dilakukan program yang memiliki peluang untuk mengganggu adat. Di Komunitas Kampung Kuta, benturan adat ini adalah larangan untuk membuat sumur dan jamban keluarga yang terintegrasi dengan substansi program peningkatan kesehatan lingkungan.

3. Perlu pengkondisian melalui pelatihan pendamping untuk membangun kompetensi budaya. Pelatihan ini diarahkan untuk mendorong kemampuan pendamping dalam pemahaman terhadap struktur sosial masyarakat, yang mengarah pada penerimaan budaya lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, M. & Bowles W. (2003). *Research for social workers: An introduction to methods*. (2nd ed.) NSW Australia: Allen & Unwin.
- Bowles, S., Gintis, H. (2002). *Social Capital and Community Governance*. The Economic Journal 112 (483), F419–F436
- Chambers, R (1997). *Rural development: Putting the last first*. New York: Longman
- Du Bois, Brenda., Karla Kongsrud Miley. (2005). *Social Work an Empowering Profession*. Boston, Allyn and Bacon.

- Du Bois Brenda. (1992). *Social Work an Empowering Profession*. London : Allyn and Bacon.
- Saleebey, Dennis. 1992. *The Strengths Perspective in Social Work Practice* New York, Longman .
- Dwi Yuliani, Aribowo, Lina Favourita. (2004). *Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kampung Kuta Desa Karang Paningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis*. STKS. Bandung.
- Ife, Jim. (1995). *Community Development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice*. Melbourne : Longman Australia Pty Ltd..
- Jim Cavaye,(2001). *Rural Community Development– New Challenges and Enduring Dilemmas*, Journal of Regional Analysis and Policy.
- Kartasasmita,G.(1996).*Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : PT. Pustaka.
- Kementerian Sosial RI. Direktorat Jaminan Kesejahteraan Keluarga. Tahun 2018 tentang *Program Keluarga Harapan*
- Kementerian Sosial RI.(2015). *Komunitas Adat Terpencil*
- M. Nagahata, (2010). *Roles of outsiders in community development – from benefactor to partner*, Research and Action for Community Governance),
- Netting, F. Ellen , Peter M. Ketnerr , Steven L. McMurtry.(2004). *Social Work Macro Practice*. USA: Pearson Educatin.Inc.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan